KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

PERSEPSI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANGKALAN

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Oleh:

AMRIA DANIYANTI DEWI
NIM : 2013411036

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2016

PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR

Nama	:	Amria Daniyanti Dewi
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bangkalan, 22 Desesember 1994
NIM	:	2013411036
Program Pendidikan	:	Diploma III
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Akuntansi
Judul	:	Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak Dari Sisi Sistem Administrasi Pepajakan Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Bangkalan

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma	Dosen Pembimbing
Tanggal : 17 Maret 2016	Tanggal : 17 Maret 2016
Drs. EC. Mochammad Farid, MM	**Supriyati, SE., M.SI., AK, CA, CTA**

I. Latar Belakang

Bagi negara Indonesia pajak berperan sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyeimbang serta alat untuk mencapai suatu tujuan kegiatan perekonomian dan pembangunan negara pada masa yang akan datang dengan menjadi lebih baik dan maju dari sebelumnya. Fungsi pajak tersebut dijadikan sebagai andalan atau pegangan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara umum.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengemukakan, penerimaan negara dari sektor pajak dalam tiga bulan pertama (Januari – Maret) tahun ini masih di bawah tahun lalu. Sejalan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah sebagai prioritas reformasi perpajakan (Rahayu dan Lingga, 2009). Reformasi tersebut menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Beberapa contoh yang dilakukan yaitu reformasi moral dan etika untuk semua pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak wajib, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*on-line payment, e-SPT, e-filing, e-ragistration*, dan Sistem Administrasi Pelayan Terpadu).

Sebelum adanya reformasi administrasi perpajakan, Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk pertama kali pada tahun 1983 dimana sejak saat itu pemerintah lndonesia memilih menerapkan *self-assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Sistem tersebut memberikan kesempatan yang luas bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan hal inilah menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap etika mengenai penggelapan pajak yang ada di Indonesia ? sehingga peneliti tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul "**PERSEPSI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANGKALAN"**

II. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi etika atas penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan pada wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. KPP Pratama Bangkalan

Memberikan sumbangan informasi serta data yang kongkrit.

2. Wajib Pajak

Sebagai bahan bacaan dalam ruang lingkup penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan.

III. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Jenis dan Sumber data

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan yaitu peneliti langsung melakukan wawancara langsung kepada wajib pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Bangkalan.
b. Kusioner yaitu peneliti menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yag dibutuhkan.

IV. Subyek Pengamatan

Subyek penelitian ini adalah responden yang merupakan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan yang telah terdaftar dalam wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan.

V. Ringkasan Pembahasan

Setelah mengumpulkan 29 kuesioner yang sudah diisi oleh 29 responden dan juga di wawancara, selanjutnya kuesioner diolah dengan menggunakan interval kelas yang dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{4 - 1}{4} = 0{,}75$$

Dari hasil interval kelas 0,75 tersebut kemudian disusun kriteria rata-rata responden yang disajikan pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
KATEGORI RATA-RATA JAWABAN RESPONDEN

Interval	Keterangan
1,00 ≤ n ≤ 1,75	Sangat Tidak Setuju/Sangat Buruk
1,75≤ n ≤ 2,50	Tidak Setuju/Buruk
2,50 ≤ n ≤3,25	Setuju/Baik
3,25≤ n ≤4.00	Sangat Setuju/Sangat Baik

Hasil perhitungan skor kuesioner berdasarkan persepsi dari sisi sistem administrasi perpajakan disajikan pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN PERSEPSI DARI SISI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Penyederhanaan prosedur khususnya permohonan keberatan pajak dapat mempercepat pelayanan	3.2
2	*Account Representative* bertanggungjawab melayani dan mengawasi kepatuhan wajib pajak	3.1
3	*Website, e-payment, e-SPT, e-filing, e-registration, call center, complaint center* dapat meningkatkan produktivitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	2.9
4	Komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak terbukti mendukung berbagai sarana komunikasi	3.0
5	*e-payment, e-SPT dan e-filing* dalam pembayaran dan pelaporan wajib pajak dimonitor lebih akurat mengenai *compliance cost* wajib pajak	3.0
6	Adanya unit pelayanan *complaint center* merekam keluhan yang diterima dalam *booklog*	3.0
7	Setiap pegawai dilengkapi personal komputer yang terhubung dengan intranet dan ekstranet	3.2
8	*Account Representative* bertugas menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan serta membantu wajib pajak memperoleh konfirmasi atas permasalahan perpajakan	3.1
9	Konsultasi internal dilakukan melalui sosialisasi peraturan baru dan pembinaan mental	3.2
10	Permasalahan dan prestasi bawahan serta data tentang kondisi organisasi diungkapkan dalam laporan berkala	3.2
Rata-rata		3.1

Sumber: Hasil pengumpulan data kuesioner

Berdasarkan tabel 5.2 dapat di diskripsikan sebagai berikut:

1. Pernyataan pertama, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,2 yang termasuk dalam kataegori setuju/baik.
2. Pernyataan kedua, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,1 yang termasauk dalam kategori setuju/baik.
3. Pernyataan ketiga, memperoleh skor rata-rata sebesar 2,9 yang termasuk dalam kategori setuju/baik.
4. Pernyataan keempat, meperoleh skor rata-rata sebesar 3,0 yang termasuk dalam kategori setuju/baik.
5. Pernyataan kelima, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,0 yang temasuk dalam kategori setuju/baik.

6. Pernyataan keenam, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,0 yang termasuk dalam kategori setuju/baik.
7. Pernyataan ketujuh, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,2 yang termasuk dalam kategori setuju/baik.
8. Pernyataan kedelapan, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,1 yang termasuk dalam kategori setuju/baik.
9. Pernyataan kesembilan, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,2 yang termasuk dalam kategori setuju/baik.
10. Pernyataan kesepuluh, memperoleh skor rata-rata sebesar 3,2 yang termasuk kategori setuju/baik.

Dari pengolahan kuesioner yang telah diuraikan berdasarkan tabel 5.2 diatas memperoleh skor rata-rata untuk keseluruhan dari sepuluh pernyataan tersebut sebesar 3,1 yang termasuk kategori setuju/ baik.

Karakteristik responden berdasarkan persepsi etika penggelapan pajak disajikan didalam tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN
PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajaknya terlalu tinggi	2.0
2	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara	1.9
3	Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan	2.0
4	Penggelapan pajak dilakukan karena hukum yang ada lemah	2.7
5	Penggelapan pajak diaggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan	1.9
6	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi	1.9
7	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak	2.0
8	Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar	2.0
Rata-rata		**2.0**

Sumber: Hasil pengumpulan data kuesioner

Berdasarkan tabel 5.3 dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Pernyataan pertama, memperoleh skor rata-rata sebesar 2,0 yang termasuk kategori tidak setuju.
2. Pernyataan kedua, memperoleh skor rata-rata sebesar 1,9 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
3. Pernyataan ketiga, memperoleh skor rata-rata sebesar 2,0 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
4. Pernyataan keempat, memperoleh skor rata-rata sebesar 2,7 yang termasuk kategori setuju.

5. Pernyataan kelima, memperoleh skor rata-rata sebesar 1,6 yang termasuk dalam kategori sangat tidak setuju.
6. Pernyataan keenam, memperoleh skor rata-rata sebesar 1,9 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
7. Pernyataan ketujuh, memperoleh skor rata-rata sebesar 2,0 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
8. Pernyataan kedelapan, memperoleh skor rata-rata sebesar 2,0 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.

Dari pengolahan kuesioner pada tabel 5.3 diatas diketahui tanggapan para responden mengenai etika penggelapan pajak, jika dilihat dari nilai rata-rata sebesar 2,0 maka dapat diartikan tidak setuju atau buruk mengenai penggelapan pajak.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari pembahasan BAB IV mengenai hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang memiliki persepsi tidak setuju/buruk mengenai etika penggelapan pajak dalam pengertian bahwa etika penggelapan pajak yang terjadi dianggap tidak etis dan buruk. Sedangkan responden yang memiliki persepsi dari sistem administrasi perpajakan dengan pengertian bahwa responden menilai setuju/baik mengenai sistem admnistrasi perpajakan yang baru yaitu dengan sistem online yang diperkenalkan oleh pertugas pajak.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan
   Tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas perpajakan yang baik dan membantu wajib pajak dengan tetap melayani wajib pajak dalam mengurus perpajakannya.
2. STIE Perbanas Surabaya
   Memberikan informasi yang sesuai dan tepat waktu serta pelayanan dengan baik untuk seluruh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya, khususnya mahasiswa yang sedang mengurus tugas akhir dan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang. *Penerimaan Di bawah Target Kemenkeu Akan Lakukan Pembinaan Wajib Pajak.* (http://setkab.go.id/penerimaan-di-bawah-target-kemenkeu-akan-lakukan-pembinaan-wajib-pajak/, diunggah pada 07 April 2015. Diunduh pada 14 Januari 2016)

Devi Nur Cahaya Ningsih dan Devi Purposari. "Determinan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". (Diakses pada 24 November 2015)

Fiki Ariyanto. *Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Penggelapan Pajak (Online).* (http://bisnis.liputan6.com/read/786180/ditjen-pajak-jemput-paksa-tersangka-penggelapan-pajak-di-riau, diunggah pada 27 Desember 2013. Diakses pada 14 September 2015)

Juliansyah Noor. 2011. *Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cetakan ke-1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Marcus Topan Sofyan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Jurnal ilmu akuntansi*. (Online), (http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/380/jbptunikompp-gdl-berrynurdi-18969-7-pengaruh-t.pdf (diakses pada tanggal 24 November 2015 pukul 07:58).

Supriyati.2015. Persepsi Mahasiswa atas *Tax Evasion* di Pemerintah pada Simposium Nasional Perpajakan 5 Madura (diakses tanggal 15 November 2015)